



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 269-279

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Kebijakan Pinjaman Online Ilegal Dan Dampak Terhadap Anak Di Bawah Umur

Lisda Ariany

Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi

Email: lisdaariany88@gmail.com

Abstrak

Pinjaman online adalah proses pemberian pinjaman uang secara daring melalui platform digital atau situs web. Dalam pinjaman online, individu atau perusahaan dapat mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau situs web yang menyediakan layanan tersebut. Pinjaman ini biasanya lebih mudah dan cepat prosesnya dibandingkan dengan pinjaman tradisional dari lembaga keuangan konvensional seperti bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan pinjaman online ilegal dan dampaknya terhadap anak di bawah umur. Dengan menggunakan pendekatan kepustakaan yang mengandalkan referensi dari buku, undang-undang dan artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, regulator internal komunikasi kepada publik menggunakan persyaratan pinjaman legal untuk perusahaan pinjaman terdaftar secara resmi. Kedua, saat ini semua pihak tidak diperlukan menghabiskan terlalu banyak energi dan memikirkan persyaratan pinjaman legal atau ilegal, karena faktanya pelanggaran hukum ditemukan oleh perusahaan pinjaman legal dan perusahaan pinjaman ilegal. Kebijakan mengenai pinjaman di bawah umur bahwa perlu diketahui usia minimal untuk meminjam uang dapat bervariasi antara negara dan tergantung pada peraturan hukum setempat. Anak di bawah umur tidak dianjurkan melakukan pinjaman online karena ada pertimbangan seperti pertimbangan hukum, pertimbangan keuangan, perlindungan konsumen, dan potensi penipuan. Pinjaman online memiliki manfaat bagi anak seperti memudahkan Proses Pendaftaran Sekolah, membantu Biaya SPP, menambah Biaya Operasional Sekolah, membantu Biaya Pendidikan di Luar Negeri dan mempercepat Proses Pendidikan Anak.

Kata Kunci: *Pinjaman Online, Anak Dibawah Umur*

Abstract

Online lending is the process of lending money boldly through a digital platform or website. In online loans, individuals or companies can apply for loans through applications or websites that provide these services. These loans are usually easier and faster to process than traditional loans from conventional financial institutions such as banks. This study aims to analyze illegal online loan policies and their impact on minors. By using a library approach that relies on references from books, laws and scientific articles. The results of this study indicate that, first, the regulator's internal communication to the public uses legal loan requirements for officially registered loan companies. Second, because all parties don't need to spend too much energy and think about the terms of a legal or illegal loan, due to the fact that violations of the law are found by legal loan companies and illegal loan companies. Policies regarding underage loans that require a known minimum age to borrow money can vary between countries and depend on local laws. Minors are not recommended to make online loans because there are considerations such as legal considerations, financial considerations, consumer protection, and potential for fraud. Online loans have benefits for children such as facilitating the school registration process, helping with tuition fees, increasing school operational costs, helping with overseas education costs and speeding up the child's education process.

Keyword: *Online Loans, Minors*

PENDAHULUAN

Pinjaman online mengacu pada praktik peminjaman uang secara daring (online) melalui platform atau aplikasi khusus yang disediakan oleh lembaga keuangan, perusahaan fintech, atau penyedia layanan pinjaman lainnya. Dalam skenario ini, peminjam dapat mengajukan permohonan pinjaman, mengisi formulir, dan mengunggah dokumen melalui internet, tanpa harus berkunjung langsung ke kantor fisik lembaga pemberi pinjaman (Rafael & Ishak, 2021).

Pinjaman online telah menjadi semakin populer karena kemudahannya, proses yang cepat, dan persyaratan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan pinjaman tradisional dari bank atau lembaga keuangan konvensional. Beberapa ciri umum dari pinjaman online termasuk aplikasi daring, yakni peminjam dapat mengajukan pinjaman melalui situs web atau aplikasi yang disediakan oleh penyedia pinjaman online. Proses cepat, Verifikasi dan persetujuan dapat dilakukan dengan cepat, beberapa bahkan hanya membutuhkan waktu beberapa jam hingga satu hari. Tanpa jaminan, beberapa pinjaman online adalah tanpa jaminan, yang berarti peminjam tidak perlu menyediakan aset atau jaminan fisik sebagai agunan (Lubis & Permata, 2023).

Meskipun pinjaman online dapat memberikan keuntungan dalam hal kemudahan dan kecepatan, peminjam juga harus berhati-hati untuk tidak terjebak dalam utang berlebihan

atau pinjaman dengan tingkat bunga yang tidak terjangkau. Penting untuk memahami semua persyaratan dan konsekuensi sebelum mengajukan pinjaman online dan selalu mengutamakan keuangan pribadi dan keselamatan finansial.

Proses peminjaman uang secara digital atau melalui platform online. Ini berarti individu atau perusahaan dapat mengajukan pinjaman melalui internet tanpa harus mengunjungi fisik lembaga keuangan tradisional seperti bank atau koperasi. Pinjaman online seringkali ditawarkan oleh platform fintech atau perusahaan peminjam online yang menyediakan layanan melalui aplikasi atau situs web mereka. Proses pengajuan pinjaman online biasanya lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan dengan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional (Sriyono et al., 2022).

Pada tahun 2021 (batas pengetahuan saya), fenomena pinjaman online di Indonesia telah menjadi topik yang sangat diperbincangkan dan kontroversial. Pinjaman online adalah layanan keuangan yang memungkinkan individu atau bisnis untuk meminjam uang secara online tanpa perlu melibatkan proses dan persyaratan yang rumit seperti yang umumnya terjadi di lembaga keuangan tradisional. Pada 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia merilis Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur perusahaan teknologi finansial (financial technology atau fintech) yang menawarkan layanan pinjaman online. Beberapa poin utama dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:

Batas Maksimum Pinjaman: Terdapat batasan jumlah maksimum yang dapat dipinjamkan kepada peminjam yakni batas Maksimum Bunga, perusahaan fintech diwajibkan untuk menetapkan batas maksimum suku bunga yang dapat dikenakan pada pinjaman. **Perlindungan Konsumen,** perusahaan fintech diharuskan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen mengenai biaya, suku bunga, tenor pinjaman, dan ketentuan lainnya. Sampai kepada regulasi diberlakukan untuk mengurangi risiko kredit macet dan melindungi konsumen dari praktik yang tidak etis dalam industri pinjaman online.

Penting untuk diingat bahwa situasi regulasi dapat berubah dari waktu ke waktu, oleh karena itu, selalu pastikan untuk memperbarui informasi terkini dari sumber yang sah atau mengacu pada pihak berwenang terkait untuk mendapatkan informasi terbaru tentang kebijakan pinjaman online di Indonesia. Bulan September 2021, kebijakan pinjaman online untuk anak-anak atau di bawah usia dewasa sangat tidak dianjurkan dan ilegal di banyak negara. Pinjaman online umumnya ditujukan untuk orang dewasa yang telah mencapai usia mayoritas dan memiliki kemampuan hukum untuk menandatangani kontrak (Hamdani et al., 2022).

Penyedia pinjaman online yang sah akan memverifikasi identitas dan usia calon

peminjam untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan usia. Jika seorang anak di bawah usia dewasa mencoba mengajukan pinjaman dengan data palsu, itu dapat dianggap sebagai tindakan ilegal dan dapat mengakibatkan masalah hukum bagi orang yang terlibat.

Anak-anak dan remaja seharusnya tidak dibiarkan terlibat dalam pinjaman atau utang kecuali dalam situasi khusus yang diawasi oleh orang tua atau wali yang bertanggung jawab. Pendidikan keuangan yang baik dan pengertian tentang tanggung jawab keuangan seharusnya ditanamkan sejak dini, sehingga anak-anak dapat memahami pentingnya mengelola uang mereka dengan bijaksana. Jika ada perubahan dalam peraturan atau kebijakan terkait pinjaman online untuk anak-anak setelah September 2021, saya sarankan untuk memeriksa sumber terpercaya atau menghubungi pihak berwenang setempat untuk mendapatkan informasi terbaru (Lubis & Permata, 2023).

Berdasarkan masalah akademik di atas bahwa fenomena pinjaman online terkhusus bagi anak-anak menjadi isu penting untuk dijadikan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menyelami lebih dalam bagaimana kebijakan pinjaman online bagi anak-anak. Sehingga menjadi informasi baru terhadap isu pinjaman online dan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan. Pendekatan kepustakaan, juga dikenal sebagai tinjauan pustaka atau kajian literatur, adalah suatu metode penelitian yang melibatkan analisis, sintesis, dan evaluasi terhadap sumber-sumber pustaka yang relevan untuk topik atau pertanyaan penelitian tertentu. Pendekatan ini merupakan langkah awal yang penting dalam proses penelitian untuk memahami perkembangan ilmu pengetahuan yang telah ada sebelumnya, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih tepat (Sugiyono, 2019). Penelitian ini mengandalkan buku, undang undang dan artikel ilmiah. Data di analisa dengan pendekatan integratif sehingga menghasilkan hasil penelitian yang detil dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pinjaman Online Ilegal

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan pada suatu rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekadar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan

(Usman, 2012). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Perspektif KH. Hasyim Asy'ari Dalam Kitab *Adab al-"Alim Wa al-Muta'allim* di pondok pesantren Darusy Syafiiyah bukan sekadar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan. sebagaimana yang dijelaskan:

Keberadaan pinjaman ilegal ini sangat meresahkan masyarakat, masalah utamanya adalah data menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang tercatat 39,5% pengaduan tentang metode penagihan yang tidak sesuai, salah satunya adalah penggunaan pihak yang ketiga sebagai debt collector. Sebuah survei Bank Indonesia melaporkan hal itu bisnis Indonesia pada Mei 2017, hanya 37% penduduk dewasa Indonesia yang memiliki rekening bank. Sementara itu, 27% penduduk Indonesia memiliki tabungan formal dan 13% memiliki tabungan formal pinjaman resmi. Dapat dikatakan bahwa 63% orang Indonesia tidak dapat memahaminya fasilitas kredit termasuk bankanky. Strategi Keuangan Nasional Terpadu (SNKI) Pemerintah.menargetkan peningkatan pangsa masyarakat yang mengakses layanan perbankan menjadi 79% di tahun 2019. Kehadiran perbankan masih relatif rendah pada akhirnya hal tersebut juga mempengaruhi tingginya akses masyarakat Tadang Beramang terhadap jenis layanan perbankan diantaranya layanan pinjaman (Rafael & Ishak, 2021).

Pengetatan bank dalam menyortir peminjam, tingkat literasi investor (literasi keuangan) masyarakat Indonesia masih cukup rendah. Melakukan servicean limangan yang ditawarkan oleh bank-bank di Indonesia belum sepenuhnya dapat diakses oleh semua orang masyarakat. Dari sini, sang paman bertekad untuk berinovasi—menyalurkan inovasi salah satu isu keuangan yang paling menarik adalah kehadiran fintech (*Financial Technology*), salah satunya adalah munculnya layanan pinjam meminjam uang dan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi atau juga meketup peer to peer landing (P2PL). UUD 1945 baik dari segi peraturan perundang-undangan, kebijakan negara maupun fungsi pengendalian perusahaan (Disemadi & Regent, 2021).

Kebijakan mengenai pinjaman online ilegal bervariasi di setiap negara, dan biasanya diatur oleh lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas regulasi keuangan dan konsumen. Dalam banyak negara, pinjaman online ilegal mengacu pada praktik pemberian pinjaman tanpa izin resmi atau melanggar peraturan yang ada. Kebijakan mengenai pinjaman online ilegal bervariasi di setiap negara, dan biasanya diatur oleh lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas regulasi keuangan dan konsumen. Dalam banyak negara, pinjaman online ilegal mengacu pada praktik pemberian pinjaman tanpa izin resmi atau melanggar peraturan yang ada (Pratama Sinaga & Alhakim, 2022).

Kebijakan terkait pinjaman online ilegal sangat bervariasi di berbagai negara. Pinjaman

online ilegal merujuk pada praktik pemberian pinjaman tanpa izin yang sah atau melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku. Beberapa masalah yang terkait dengan pinjaman online ilegal antara lain suku bunga yang sangat tinggi, praktik penagihan yang agresif, kurangnya transparansi, dan potensi eksploitasi terhadap konsumen. Beberapa negara telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini dengan menetapkan regulasi yang lebih ketat terhadap layanan pinjaman online. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik penipuan dan melindungi kestabilan sektor keuangan.

Ketentuan pinjam meminjam sendiri diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama yang mengajukan barang yang dapat diselesaikan terpakai kepada pihak kedua dengan persyaratan kedua akan membawa barang-barang ke jumlah pertama dan jumlah kedua. Kedua, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjol Ilegal. Sampai Tahun 2016 belum ada peraturan khusus yang mengatur pinjol, oleh karena itu, saat itu OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Secara terminologi OJK memberikan terminologi terkait pinjol sebagai berikut: "Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet." (Faisal et al., 2022).

Perusahaan pinjol sebagai penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Setelah terdaftar di OJK, perusahaan pinjol wajib mengajukan permohonan izin dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Dalam POJK ini terdapat beberapa klausul yang membuat perusahaan pinjol dapat diawasi secara berkala oleh OJK yaitu: (1) Perusahaan pinjol wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk keperluan penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi; (2) Perusahaan pinjol wajib menyerahkan laporan bulanan dan tahunan yang memuat kinerja keuangan, kinerja, pengaduan pengguna.

Contoh lain pinjol Amartha yang juga terdaftar di OJK, Amartha fokus melayani masyarakat yang unbanked, terutama menyasar kelompok ibu-ibu yang memerlukan modal usaha. Di Amartha proses peminjaman sebagai berikut: (1) Peminjam menghubungi petugas layanan terdekat; (2) Petugas pinjol amartha menilai kelayakan usaha peminjam dengan melakukan survey langsung, mengarahkan peminjam membentuk kelompok, memberikan pelatihan terkait pengelolaan modal dan kedisiplinan pengembalian; (3) Penilaian peminjam

juga dilakukan menggunakan credit scoring; (4) Selama pembiayaan peminjam wajib mengikuti pertemuan mingguan bersama kelompoknya.

Sejak periode Agustus 2018 hingga akhir 2019 tercatat sudah ada 4.020 finansial teknologi ilegal termasuk pinjol ilegal yang diblokir oleh anggota Satgas Waspada Investasi yaitu Kementerian Kominfo. Meski sudah banyak dilakukan pemblokiran, pinjol ilegal baru tetap bermunculan, hal ini dimungkinkan karena secara teknologi memang tidak sulit. Secara praktis, developer aplikasi pinjol yang telah diblokir, dengan mudahnya dapat mendevlop aplikasi pinjol lagi dengan referensi source code aplikasi yang sama (copy paste), melakukan sedikit kustomisasi diakhir dengan memberikan nama/brand pinjol online baru. Untuk studi banding, Data China Banking and Insurance Regulatory Commission yang dikutip dari Reuters, pada bulan Oktober 2019 lalu, jumlah perusahaan pinjol hanya tersisa 247, turun drastis dari tahun 2015 yang menjadi puncaknya dengan jumlah 6000 perusahaan pinjol.²³ Penurunan drastis tersebut disebabkan karena banyaknya pinjol ilegal yang beroperasi, melakukan fraud, tidak menerapkan lending risk dan sebab lainnya (Pratama Sinaga & Alhakim, 2022).

Terkait keberadaan pinjol ilegal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman modal (BKPM) sepakat memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas/Satgas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal, termasuk untuk menangani pinjol ilegal. Satgas Waspada Investasi memiliki fungsi pencegahan dan penanganan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Secara iumum kegiatan pencegahan dilakukan dengan cara edukasi dan sosialisasi serta pemantauan potensi dugaan tindakan melawan hukum. Untuk kegiatan penangan secara umum dilakukan dengan inventarisasi, analisis, menghentikan/menghambat tindakan melawan hukum di bidang penghimpungan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, melakukan pemeriksaan dugaan.

Dampaknya Terhadap Anak Di Bawah Umur

Secara umum, pinjaman online untuk individu di bawah umur tidak dianjurkan atau bahkan ilegal di banyak yurisdiksi. Kebijakan mengenai pinjaman dan usia minimal untuk meminjam uang dapat bervariasi antara negara dan tergantung pada peraturan hukum setempat (Firdaus, 2022). Beberapa negara atau wilayah mungkin mengharuskan calon peminjam untuk mencapai usia mayoritas hukum (biasanya 18 tahun) sebelum memenuhi syarat untuk meminjam uang secara legal. Beberapa alasan mengapa pinjaman online untuk

individu di bawah umur tidak dianjurkan atau diatur ketat adalah:

- a. Pertimbangan hukum: Pemberi pinjaman harus memastikan bahwa peminjam memiliki kapasitas hukum untuk mengikat kontrak, dan ini biasanya hanya dimiliki oleh orang-orang yang telah mencapai usia mayoritas hukum.
- b. Pertimbangan keuangan: Anak di bawah umur mungkin belum memiliki pendapatan atau stabilitas keuangan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.
- c. Perlindungan konsumen: Kebijakan yang mengatur pinjaman di bawah umur juga dimaksudkan untuk melindungi konsumen muda dari potensi utang berlebihan atau penyalahgunaan sistem pinjaman.
- d. Potensi penipuan: Anak di bawah umur mungkin lebih rentan terhadap penipuan atau penyalahgunaan data pribadi saat berurusan dengan pinjaman online.

Sebagian besar negara memiliki batasan usia hukum untuk mengakses layanan keuangan seperti pinjaman, kartu kredit, dan produk keuangan lainnya. Batasan usia ini ditetapkan untuk melindungi anak-anak dan remaja dari beban keuangan yang tidak sesuai dengan tingkat kematangan dan tanggung jawab mereka. Mengizinkan pinjaman online kepada individu di bawah umur dapat menyebabkan masalah serius, termasuk:

- a. Ketidakmampuan untuk membayar: Anak di bawah umur tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil, sehingga mereka tidak dapat membayar pinjaman dengan tepat waktu, mengakibatkan beban hutang yang meningkat.
- b. Penyalahgunaan: Orang yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan anak di bawah umur untuk mengajukan pinjaman dengan tujuan yang tidak baik.
- c. Perundungan finansial: Membebankan tanggung jawab keuangan pada anak di bawah umur dapat menyebabkan perundungan finansial dan memberi mereka beban hidup yang tidak wajar.
- d. Jika ada platform atau lembaga keuangan yang mengizinkan pinjaman online kepada individu di bawah umur, hal itu melanggar hukum dan harus dilaporkan kepada otoritas yang berwenang.

Penting bagi orang tua dan wali untuk memahami peran mereka dalam membimbing anak-anak tentang pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan menyediakan pengetahuan tentang masalah keuangan sejak dini. Selain itu, pemerintah dan lembaga keuangan juga harus bekerja sama untuk memperkuat undang-undang dan mengawasi praktik pinjaman online untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan dan penipuan. Pinjaman online kini semakin mudah diakses oleh masyarakat. Tidak hanya untuk kebutuhan gaya hidup, pinjaman online juga bisa digunakan untuk membiayai pendidikan anak. Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dengan mengajukan pinjaman online untuk

membiayai pendidikan anak:

a. Memudahkan Proses Pendaftaran Sekolah

Salah satu manfaat dari pinjaman online untuk pendidikan anak adalah memudahkan proses pendaftaran sekolah. Beberapa sekolah atau perguruan tinggi membutuhkan pembayaran biaya pendaftaran sebelum proses seleksi dimulai. Dengan menggunakan pinjaman online, orang tua bisa mempercepat proses pendaftaran anak ke sekolah atau perguruan tinggi yang diinginkan.

b. Membantu Biaya SPP

Selain biaya pendaftaran, orang tua juga harus mengeluarkan biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) setiap bulannya. Biaya SPP yang semakin tinggi tentu akan memberatkan keuangan keluarga. Dengan menggunakan pinjaman online, orang tua bisa membantu membiayai SPP anak setiap bulannya tanpa harus mengganggu keuangan bulanan.

c. Menambah Biaya Operasional Sekolah

Selain biaya pendaftaran dan SPP, ada juga biaya operasional lainnya yang harus dikeluarkan ketika anak bersekolah, seperti biaya seragam, buku, dan transportasi. Dengan menggunakan pinjaman online, orang tua bisa membantu menambah biaya operasional sekolah anak tanpa harus menunda-nunda pembayaran atau mengorbankan keuangan bulanan.

d. Membantu Biaya Pendidikan di Luar Negeri

Tidak hanya di dalam negeri, banyak orang tua yang ingin memberikan pendidikan terbaik untuk anak mereka dengan mengirim mereka ke luar negeri. Namun, biaya pendidikan di luar negeri tentu jauh lebih mahal daripada di dalam negeri. Dengan menggunakan pinjaman online, orang tua bisa membantu membiayai pendidikan anak di luar negeri tanpa harus menunda-nunda rencana tersebut.

e. Mempercepat Proses Pendidikan Anak

Dengan bantuan pinjaman online, orang tua bisa mempercepat proses pendidikan anak. Biaya pendidikan yang terpenuhi akan membantu anak-anak mendapatkan fasilitas yang lebih baik di sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Hal ini akan membantu anak-anak untuk memperoleh prestasi yang lebih baik dan mempercepat proses pendidikan mereka.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, penulis menyimpulkan sebagai berikut, pertama, regulator internal komunikasi kepada publik menggunakan persyaratan pinjaman legal untuk perusahaan pinjaman terdaftar secara resmi, untuk pinjaman yang tidak terdaftar, regulator

menyebutnya sebagai pinjaman liar. Meskipun disebut pinjaman ilegal, perjanjian pinjaman antara pinjaman ilegal dan pengguna biasa sah, artinya pemakai tidak dapat melepaskan kewajiban membayar utang dengan alasan karena meminjam di perusahaan pinjaman ilegal. Kedua, saat ini semua pihak tidak diperlukan menghabiskan terlalu banyak energi dan memikirkan persyaratan pinjaman legal atau ilegal, karena faktanya pelanggaran hukum ditemukan oleh perusahaan pinjaman legal dan perusahaan pinjaman ilegal. Kebijakan mengenai pinjaman di bawah umur bahwa perlu diketahui usia minimal untuk meminjam uang dapat bervariasi antara negara dan tergantung pada peraturan hukum setempat. Beberapa negara atau wilayah mungkin mengharuskan calon peminjam untuk mencapai usia mayoritas hukum (biasanya 18 tahun) sebelum memenuhi syarat untuk meminjam uang secara legal. Anak di bawah umur tidak dianjurkan melakukan pinjaman online karena ada pertimbangan seperti pertimbangan hukum, pertimbangan keuangan, perlindungan konsumen, dan potensi penipuan. Penting bagi orang tua dan wali untuk memahami peran mereka dalam membimbing anak-anak tentang pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan menyediakan pengetahuan tentang masalah keuangan sejak dini. Meskipun beberapa analisa pinjaman online memiliki manfaat bagi anak seperti memudahkan Proses Pendaftaran Sekolah, membantu Biaya SPP, menambah Biaya Operasional Sekolah, membantu Biaya Pendidikan di Luar Negeri dan mempercepat Proses Pendidikan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Disemadi, H. S., & Regent. (2021). Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2), 605–618. <https://doi.org/https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>
- Faisal, A. A., Wiradimadja, A., Ajra, D. A., Adhitama, M. D., Ramadhan, R., & S, M. A. (2022). Attack On Pinjol: Siapa Yang Salah Antara Pinjol dan Debitur. *Cinematology: Journal Anthology of Film and Television Studies*, 2(1), 88–95.
- Firdaus, Y. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(3), 102–108.
- Hamdani, F., Luh, N., Puja, V., Amru, H., & Fiqri, H. (2022). Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia). *Indonesia Berdaya*, 3(3), 567–576.
- Lubis, A. P., & Permata, C. (2023). Perlindungan Anak Terhadap Iklan Vulgar Pada Game Online Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Kabilah: Journal of Social Community*, 8(1), 698–709.

- Pratama Sinaga, E., & Alhakim, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia. *UNES Law Review*, 4(3), 283–296. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.235>
- Rafael, A., & Ishak, S. (2021). Analisis Tentang Tindakan Penagihan Yang Melawan Hukum Terkait Pinjaman Online dari Fintech Ilegal (Studi Kasus Atas Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 939–963.
- Sriyono, J., Syaufi, A., & Mispansyah. (2022). Pinjaman Online Tidak Beizin Dalam Perspektif. *Wasaka Hukum*, 10(2337), 1–19.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)*. Alfabeta.